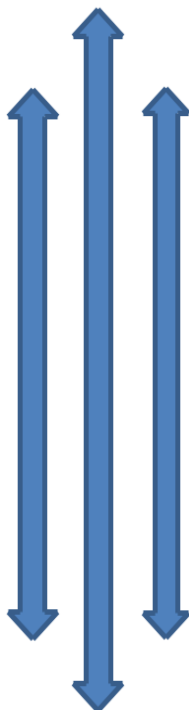




**KEPALA DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA
TAMANGEDE NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAMANGEDE TAHUN ANGGARAN 2024**



**Ditetapkan :
HARI , Agustus 2024**

**DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. RT. RW. No. Dusun
Desa Telp. (0294) -
Email : Kode Pos 51355



KEPALA DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE
NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMANGEDE

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Desa Tamangede Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Tamangede tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tamangede tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Tamangede Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan /atau stabilitas sistem keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 28. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
45. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
46. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
48. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
49. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
50. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
51. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
52. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 252);

53. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
54. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
55. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
56. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa.
57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.07 /2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.07 /2021 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
59. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
61. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
62. Surat Edaran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
63. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
64. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

66. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
68. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 162);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 12);
74. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
76. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah

Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 seri E No. 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 35);

77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
80. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
81. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);
82. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E Nomor 47);
83. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
84. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.5 Tahun 2017 tentang Penghasilan

tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);

85. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
86. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
87. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
88. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
89. Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);
90. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
91. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
92. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
93. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain – lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
94. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
95. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022

Nomor 9);

96. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
97. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
98. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
99. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 20);
100. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
101. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
102. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 20);
103. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
104. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 52);
105. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
106. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 59);
107. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
108. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
109. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 29);

- 110.Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/84/2024 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggran 2024;
- 111.Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/140/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/84/2024 Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggran 2024;
- 112.Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2022 Nomor 2);
- 113.Peraturan Desa Tamangede Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2018 Nomor 9);
- 114.Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2020 Nomor 4);
- 115.Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 2);
- 116.Peraturan Desa Tamangede Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 5);
- 117.Peraturan Kepala Desa Tamangede Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA TAMANGEDE NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 2.043.633.058,00 (Dua milyar empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 336.000,00 (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.043.297.058,00 (Dua milyar empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	139.196.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp	139.196.000,00

1.2. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp	1.904.437.058,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	<u>(336.000,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.904.101.058,00
1.3. Pendapatan Lain		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan lain setelah perubahan	Rp	0,00
Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.043.297.058,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	692.129.937,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	<u>12.488.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	704.618.937,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	679.547.536,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	<u>207.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	679.754.536,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	439.487.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	<u>(7.400.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	432.087.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp	76.304.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	<u>(2.632.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	73.672.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	232.000.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	232.000.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	<u>2.122.132.473,00</u>
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(78.835.415,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	75.835.415,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	<u>3.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	78.835.415,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	78.835.415,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tamangede oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tamangede
Pada tanggal, 13 Agustus 2024
KEPALA DESA TAMANGEDE



Diundangkan di Tamangede

Pada tanggal, 13 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA TAMANGEDE,



BAYU AJI DWICAHYO

BERITA DESA TAMANGEDE TAHUN 2024 NOMOR 2

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMANGEDE
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perkades sebelum Perubahan

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
		PENDAPATAN						
1.		Pendapatan Asli Desa		139.196.000,00		139.196.000,00	0,00	
4.1.		Hasil Aset Desa		139.196.000,00		139.196.000,00	0,00	
4.1.2.		Pengelolaan Tanah Kas Desa		139.196.000,00		139.196.000,00	0,00	
1.1.2.01.								
4.2.		Pendapatan Transfer		1.904.437.058,00		1.904.101.058,00	(336.000,00)	
4.2.1.		Dana Desa		1.341.924.000,00		1.341.924.000,00	0,00	
1.2.1.01.		Dana Desa		1.341.924.000,00		1.341.924.000,00	0,00	
4.2.2.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		103.546.058,00		103.546.058,00	0,00	
1.2.2.01.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		103.546.058,00		103.546.058,00	0,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa		338.967.000,00		338.631.000,00	(336.000,00)	
1.2.3.01.		Alokasi Dana Desa		338.967.000,00		338.631.000,00	(336.000,00)	
4.2.4.		Bantuan Keuangan Provinsi		120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	
1.2.4.01.		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain		0,00		0,00	0,00	
4.3.6.		Bunga Bank		0,00		0,00	0,00	
1.3.6.01.		Bunga Bank		0,00		0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		2.043.633.058,00		2.043.297.058,00	(336.000,00)	
		BELANJA						
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>						
1.1		Penyelenggaraan Belanja Slitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		<u>692.129.937,00</u>		<u>704.618.937,00</u>	<u>12.489.000,00</u>	
				<u>911.855.937,00</u>		<u>612.919.937,00</u>	<u>1.064.000,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>						
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	1 Orang	51.060.000,00	1 Orang	50.640.000,00	(420.000,00)	ADD, PBH
				51.060.000,00		50.640.000,00	(420.000,00)	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7	8	9
1.1.01	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		51.060.000,00		50.640.000,00	(420.000,00)	
1.1.01	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa		44.850.000,00		43.050.000,00	(1.800.000,00)	
1.1.01	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa		6.210.000,00		7.590.000,00	1.380.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	8 Orang	279.289.640,00	8 Orang	279.455.166,00	165.526,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai		279.289.640,00		279.455.166,00	165.526,00	
1.1.02	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		279.289.640,00		279.455.166,00	165.526,00	
1.1.02	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		245.019.920,00		237.569.990,00	(7.449.930,00)	
1.1.02	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa		34.269.720,00		41.885.176,00	7.615.456,00	
1.1.03	5.1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Orang	18.350.448,00	9 Orang	18.350.448,00	0,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.3.	Belanja Pegawai		18.350.448,00		18.350.448,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.03.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		18.350.448,00		18.350.448,00	0,00	
1.1.03	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		2.583.360,00		2.583.360,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK)	1 Paket	15.767.088,00	1 Paket	15.767.088,00	0,00	ADD, DLL, PAC
1.1.04	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa		25.435.449,00		26.753.923,00	1.318.474,00	
1.1.04	5.2.1.01.	Belanja Barang Perlengkapan		25.435.449,00		26.753.923,00	1.318.474,00	
1.1.04	5.2.1.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		11.035.449,00		10.178.923,00	(856.526,00)	
1.1.04	5.2.1.04.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		4.016.449,00		3.684.923,00	(331.526,00)	
1.1.04	5.2.1.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakara		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		264.000,00		264.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.1.09.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		930.000,00		405.000,00	(525.000,00)	
1.1.04	5.2.2.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		2.400.000,00		2.400.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium		2.925.000,00		2.925.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		5.400.000,00		7.575.000,00	2.175.000,00	
1.1.04	5.2.5.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD		5.400.000,00		5.400.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.01.	Belanja Operasional Perkantoran		0,00		2.175.000,00	2.175.000,00	
1.1.04	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Listrik		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.1.04	5.2.5.07.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.1.04		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
1.1.04	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		0,00			0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	6 Orang	39.422.400,00	6 Orang	39.422.400,00	0,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai		39.422.400,00		39.422.400,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.	Tunjangan BPD		39.422.400,00		39.422.400,00	0,00	
1.1.05	5.1.4.01.	Tunjangan Keadudukan BPD		39.422.400,00		39.422.400,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Serag	1 Paket	985.000,00	1 Paket	985.000,00	0,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		985.000,00		985.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		985.000,00		985.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		250.000,00		250.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		105.000,00		105.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		630.000,00		630.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29 Orang	24.360.000,00	29 Orang	24.360.000,00	0,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		24.360.000,00		24.360.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		24.360.000,00		24.360.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW		24.360.000,00		24.360.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana De	1 Tahun	40.257.000,00	1 Tahun	40.257.000,00	0,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga		40.257.000,00		40.257.000,00	0,00	
1.1.08	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		40.257.000,00		40.257.000,00	0,00	
1.1.08	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		40.257.000,00		40.257.000,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan)	1 Orang	60.000.000,00	1 Orang	60.000.000,00	0,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai		60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Beng		60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelola	8 Orang	72.696.000,00	8 Orang	72.696.000,00	0,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai		72.696.000,00		72.696.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		72.696.000,00		72.696.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bu		72.696.000,00		72.696.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan		45.384.000,00		45.384.000,00	0,00	
		Kearsipan					16.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1 Paket	1.429.000,00	1 Paket	17.429.000,00	16.000.000,00	DDS

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
3		4	5	6	7	8	9	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.429.000,00		1.429.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.429.000,00		1.429.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.429.000,00		1.429.000,00	0,00	
1.3.01	5.3	Belanja Modal		0,00		16.000.000,00	16.000.000,00	
1.3.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		0,00		16.000.000,00	16.000.000,00	
1.3.01	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio		0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
1.3.01	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer		0,00		10.000.000,00	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4 Paket	43.935.000,00	4 Paket	43.935.000,00	0,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		43.935.000,00		43.935.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		6.335.000,00		6.335.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		905.000,00		905.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.660.000,00		4.660.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbu-umbul/Spanduk		200.000,00		200.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		70.000,00		70.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		28.600.000,00		28.600.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		500.000,00		500.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		26.100.000,00		26.100.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		34.910.000,00		30.335.000,00	(4.575.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Nor	2 Kali					
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.275.000,00	1 Kali	4.700.000,00	(4.575.000,00)	DDS
1.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		9.275.000,00		4.700.000,00	(4.575.000,00)	
1.4.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		2.275.000,00		1.200.000,00	(1.075.000,00)	
				125.000,00		125.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
1.4.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.950.000,00		975.000,00	(975.000,00)	
1.4.02	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		200.000,00		100.000,00	(100.000,00)	
1.4.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.000.000,00		500.000,00	(500.000,00)	
1.4.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.000.000,00		500.000,00	(500.000,00)	
1.4.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		6.000.000,00		3.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.4.02	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		6.000.000,00		3.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		20.685.000,00		20.685.000,00		DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 Kali	20.685.000,00	2 Kali	20.685.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		6.035.000,00		5.035.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		295.000,00		295.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		525.000,00		525.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.915.000,00		3.915.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		300.000,00		300.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		6.650.000,00		6.650.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas		3.650.000,00		3.650.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		9.000.000,00		9.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LI		2.475.000,00		2.475.000,00	0,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 Kali	2.475.000,00	2 Kali	2.475.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.475.000,00		2.475.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		300.000,00		300.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		2.175.000,00		2.175.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Mas.		2.475.000,00		2.475.000,00	0,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	2.475.000,00	1 Paket	2.475.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.475.000,00		2.475.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.475.000,00		2.475.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		755.000,00		755.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
				720.000,00		720.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						9
2.1		Sub Bidang Pendidikan						
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des						
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	679.547.536,00		679.754.536,00	207.000,00	
2.1.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		25.585.000,00		27.835.000,00	2.250.000,00	
2.1.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		25.585.000,00	1 Paket	27.835.000,00	2.250.000,00	DDS
2.1.01	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		15.745.000,00		17.995.000,00	2.250.000,00	
2.1.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.295.000,00		2.295.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		850.000,00		850.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		12.600.000,00		14.850.000,00	2.250.000,00	
2.1.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		4.800.000,00		4.800.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		5.040.000,00		5.040.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		167.490.536,00		157.490.536,00	(10.000.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insenti						
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	5.000.000,00	1 Paket	5.000.000,00	0,00	DDS
2.2.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, insenti						
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	103.434.000,00	1 Paket	103.434.000,00	0,00	DDS
2.2.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		103.434.000,00		103.434.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		73.584.000,00		73.584.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		822.000,00		822.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		42.000,00		42.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		72.720.000,00		72.720.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		27.600.000,00		27.600.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan i						
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 Paket	7.625.000,00	1 Paket	7.625.000,00	0,00	DDS
				7.625.000,00		7.625.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
			4	5	6	7		
2.2.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		4.375.000,00		4.375.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.250.000,00		1.250.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		650.000,00		650.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.475.000,00		2.475.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.250.000,00		3.250.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		750.000,00		750.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	1 Paket	39.881.536,00	1 Paket	29.881.536,00	(10.000.000,00)	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		39.881.536,00		29.881.536,00	(10.000.000,00)	
2.2.04	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		26.381.536,00		16.381.536,00	(10.000.000,00)	
2.2.04	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		86.536,00		86.536,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		140.000,00		140.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		3.255.000,00		3.255.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		500.000,00		500.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		22.400.000,00		12.400.000,00	(10.000.000,00)	
2.2.04	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.100.000,00		1.100.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		500.000,00		500.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		600.000,00		600.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		12.400.000,00		12.400.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		12.400.000,00		12.400.000,00	0,00	
2.2.06		Pengasutan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20 Balita	8.550.000,00	20 Balita	8.550.000,00	0,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.550.000,00		8.550.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.700.000,00		2.700.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		2.250.000,00		2.250.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPc	1 Paket	3.000.000,00	1 Paket	3.000.000,00	0,00	DDS

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
2.2.09	5.3.	Belanja Modal		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		359.581.000,00		386.350.000,00	26.769.000,00	DDS, PBP
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan F	165.65 M	150.908.000,00	107 M	177.677.000,00	26.769.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal		150.908.000,00		177.677.000,00	26.769.000,00	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		150.908.000,00		177.677.000,00	26.769.000,00	
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		525.000,00		1.050.000,00	525.000,00	
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		6.400.000,00		14.640.000,00	8.240.000,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		141.433.000,00		144.564.100,00	3.131.100,00	
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		1.750.000,00		13.896.000,00	12.146.000,00	
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		800.000,00		3.526.900,00	2.726.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	135 m	208.673.000,00	120 m	208.673.000,00	0,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal		208.673.000,00		208.673.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		208.673.000,00		208.673.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan		600.000,00		750.000,00	150.000,00	
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		50.700.000,00		55.580.000,00	4.880.000,00	
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		156.573.000,00		150.343.000,00	(6.230.000,00)	
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		0,00		1.200.000,00	1.200.000,00	
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		800.000,00		800.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		124.191.000,00		102.229.000,00	(21.962.000,00)	DDS
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	70 m	124.191.000,00	102 m	102.229.000,00	(21.962.000,00)	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal		124.191.000,00		102.229.000,00	(21.962.000,00)	
2.4.16	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		600.000,00		775.000,00	175.000,00	
2.4.16	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiat		28.900.000,00		29.280.000,00	(620.000,00)	
2.4.16	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		92.891.000,00		71.374.000,00	(21.517.000,00)	
2.4.16	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material		800.000,00		800.000,00	0,00	
2.4.16	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan		2.700.000,00		5.850.000,00	3.150.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						

KODE REK	URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)			
								4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balitro Dll)		1 Paket	2.700.000,00	13 Paket	5.850.000,00	3.150.000,00	DDS
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa			2.700.000,00		5.850.000,00	3.150.000,00	
2.6.02	Belanja Barang Perlengkapan			2.700.000,00		5.850.000,00	3.150.000,00	
2.6.02	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.700.000,00		5.850.000,00	3.150.000,00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			439.487.000,00		432.087.000,00	(7.400.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		1 Paket	20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	PBP
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	0,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
3.2.01	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00		20.000.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			401.423.000,00		395.423.000,00	(6.000.000,00)	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt I		3 Kali	10.000.000,00		4.000.000,00	(6.000.000,00)	DDS
3.3.01	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	3 Kali	4.000.000,00	(6.000.000,00)	
3.3.01	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00		4.000.000,00	(6.000.000,00)	
3.3.01	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00		4.000.000,00	(6.000.000,00)	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan		1 Unit	371.073.000,00	1 Unit	371.073.000,00	0,00	DDS
3.3.05	Belanja Modal			371.073.000,00		371.073.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			371.073.000,00		371.073.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			675.000,00		675.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			32.700.000,00		32.700.000,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			337.598.000,00		331.598.000,00	(6.000.000,00)	
3.3.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			0,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
3.3.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			100.000,00		100.000,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa		1 Paket	20.350.000,00	1 Paket	20.350.000,00	0,00	DDS
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa			20.350.000,00		20.350.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang Perlengkapan			14.350.000,00		14.350.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			175.000,00		175.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.575.000,00		1.575.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00		100.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
3.3.06	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		12.500.000,00		12.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		18.064.000,00		18.064.000,00	(1.400.000,00)	PBH
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1 Paket	3.584.000,00	1 Paket	2.184.000,00	(1.400.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.584.000,00		2.184.000,00	(1.400.000,00)	
3.4.02	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.984.000,00		584.000,00	(1.400.000,00)	
3.4.02	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		104.000,00		104.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		480.000,00		480.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		1.400.000,00		0,00	(1.400.000,00)	
3.4.02	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		1.800.000,00		1.600.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Transport kepada Masyarakat		1.600.000,00		1.600.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1 Paket	9.480.000,00	1 Paket	9.480.000,00	0,00	PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.480.000,00		9.480.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		9.480.000,00		9.480.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		8.730.000,00		8.730.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		8.730.000,00		8.730.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		750.000,00		750.000,00	0,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	1 Paket	5.000.000,00	1 Paket	5.000.000,00	0,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		4.700.000,00		4.700.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.336.000,00		1.336.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.364.000,00		1.364.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		300.000,00		300.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		300.000,00		300.000,00	0,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		76.304.000,00		73.972.000,00	(2.632.000,00)	

Printed by: Siskadins

13/09/2024 8:36:59

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						9
4.2.01		Peningkatan Produksi/ Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/peng						
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	1 Paket	70.304.000,00		65.812.000,00	(4.492.000,00)	DDS
4.2.01	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		64.204.000,00	1 Paket	59.712.000,00	(4.492.000,00)	
4.2.01	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan		64.204.000,00		59.712.000,00	(4.492.000,00)	
4.2.01	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		64.204.000,00		59.712.000,00	(4.492.000,00)	
4.2.01	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		625.000,00		525.000,00	(100.000,00)	
4.2.01	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan		7.340.000,00		7.320.000,00	(20.000,00)	
4.2.01	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan		55.839.000,00		49.267.000,00	(6.572.000,00)	
4.2.01		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		0,00		1.800.000,00	1.800.000,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	1 Paket	400.000,00	1 Paket	800.000,00	400.000,00	DDS
4.2.04	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan		6.100.000,00		6.100.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		6.100.000,00		6.100.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		100.000,00		100.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		6.000.000,00		7.880.000,00	1.880.000,00	DDS
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1 Orang	1.500.000,00	1 Orang	1.410.000,00	(90.000,00)	
4.3.01	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		1.500.000,00		1.410.000,00	(90.000,00)	
4.3.01	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		1.500.000,00		1.410.000,00	(90.000,00)	
4.3.01	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan		0,00		1.410.000,00	1.410.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1.500.000,00		0,00	(1.500.000,00)	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2 Orang	4.500.000,00	5 Orang	6.450.000,00	1.950.000,00	DDS
4.3.02	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		4.500.000,00		6.450.000,00	1.950.000,00	
4.3.02	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		0,00		6.450.000,00	6.450.000,00	
4.3.02	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan		4.500.000,00		0,00	(4.500.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		232.000.000,00		232.000.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana		10.000.000,00	1 Paket	10.000.000,00	0,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1 Paket	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
		3	4	5	6	7	8	9
5.1.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1 Paket	6.000.000,00	1 Paket	6.000.000,00	0,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak		216.000.000,00		216.000.000,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	60 KPM	216.000.000,00	60 KPM	216.000.000,00	0,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		216.000.000,00		216.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga		216.000.000,00		216.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		216.000.000,00		216.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA		2.119.468.473,00		2.122.132.473,00	2.664.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)		(75.835.415,00)		(78.835.415,00)	(3.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN						
6.1.		Penerimaan Pembiayaan		75.835.415,00		78.835.415,00	3.000.000,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya		75.835.415,00		78.835.415,00	3.000.000,00	
3.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya		75.835.415,00		78.835.415,00	3.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC		75.835.415,00		78.835.415,00	3.000.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00		0,00	0,00	

